



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TONY KARNAIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 512844

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	1.500.000
1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	1.500.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	8.200.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	91.722.982
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	101.422.982
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	437.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-335.577.018

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DIAN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 663286

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 152.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/224 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/161 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 30.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2020, LAINNYA Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 6.400.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 26.226.367

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 100.000.000

**Sub Total** Rp. 314.626.367

**III. HUTANG** Rp. 270.500.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 44.126.367

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

